# Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Bumdes Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat

<sup>1</sup>Reni Marlina\*, <sup>2</sup>Yudi Suwandi \*Corresponding Author <sup>12</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, Bandung, Indonesia email: <sup>1</sup>reni.marlina@ekuitas.ac.id, <sup>2</sup>yudisuwandi@gmail.com

### Abstract

BUMDes Karya Mandiri Lembang District in West Bandung Regency is one of the 165 BUMDes in the West Bandung Regency area engaged in the business of providing clean water, stall/kiosk rental, multipurpose buildings and agribusiness. The problems experienced by BUMDes Karya Mandiri are that BUMDes are not yet optimal as drivers of the village economy, weak managerial capabilities of BUMDes management resources and limited capital. Based on this, service is carried out in the form of training for BUMDes managers and staff and assistance related to Human Resources aspects and institutional aspects related to improving the managerial abilities of BUMDes managers and socializing alternative funding using digital information technology. The results of the activity are an increase in the human resource capacity of BUMDes managers and an increase in financial literacy regarding alternative sources of external funding which can increase the understanding of BUMDes managers in applying management principles in managing BUMDes as well as increasing the financial literacy of BUMDes managers so that they can improve performance in carrying out the operationalization of BUMDes.

Keywords: BUMDes, managerial capabilities, human resources, funding.

#### **Abstrak**

BUMDes Karya Mandiri Kecamatan Lembang di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu BUMDes dari 165 BUMDes di kawasan Kabupaten Bandung Barat bergerak dibidang usaha penyelenggaraan air bersih, penyewaan warung/kios, Gedung serba guna dan agribisnis. Permasalahan yang dialami oleh BUMDes Karya Mandiri adalah belum optimalnya BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa, lemahnya kemampuan manajerial sumber daya pengelola BUMDes dan keterbatasan permodalan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengabdian dalam bentuk pelatihan kepada pengelola dan staf BUMDes dan pendampingan terkait aspek Sumber Daya Manusia dan aspek kelembagaan berkaitan dengan peningkatan kemampuan manajerial dari pengelola BUMDes dan sosialisasi mengenai alternatif pendanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi digital. Hasil dari kegiatan yaitu adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes dan peningkatan literasi keuangan mengenai sumber alternatif pendanaan eksternal dapat meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes dalam menerapkan prinsip manajemen dalam pengelolaan BUMDes serta peningkatan literasi keuangan pengelola BUMDes sehingga dapat meningkatkan performansi dalam menjalankan operasionalisasi BUMDes

**Kata kunci:** BUMDes, kemampuan manajerial, sumber daya manusia, pendanaan.

------

## 1. Pendahuluan

Pembentukan BUMDes diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BUMDes merupakan pelaksana ekonomi Desa yang dengan cara bersama-sama untuk menumbuhkan kesejahteraan desa melalui pengoptimalan sumber daya yang dimiliki Desa. BUMDes adalah unsur dari Lembaga yang dapat meningkatkan dan memberikan andil dalam menumbuhkan Indeks Pembangunan Manusia. Membangun ketahanan ekonomi Desa dalam rangka menciptakan

kesejahteraan bagi masyarakatnya, dibutuhkan pemahaman dan upaya dari seluruh warga desa dan pelaku usaha sehingga BUMDes dapat mencapai tujuannya (Fatimah, 2019).

Ekonomi pedesaan pertumbuhannya sebagian besar dinilai lebih lambat jika dibandingkan Pembangunan ekonomi perkotaan (Anggraeni, 2016), Solusi yang dapat digunakan salah satunya adalah dengan memotivasi gerak perekonomian pedesaan dengan menggunakan kewirausahaan desa yang merupakan strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan desa (Ansari et al., 2013). BUMDes merupakan Badan Usaha yang didirikan pada tingkat Desa yang fokus pada pengembangan perekonomian masyarakat desa dengan menjadikan BUMDes menjadi bagian dari proses produksi bagi produk-produk lokal berbahan baku lokal (Yuesti, 2017) Ruang usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes menurut Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 yaitu BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya(Lumintang et al., 2020). BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki peran cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, BUMDes perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan Masyarakat (Rahmatika et al, 2019)

BUMDes dapat menciptakan usaha baru, dapat menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan berdampak terhadap ekonomi pedesaan serta budaya masyarakat dengan cara melalui pendirian BUMDes (Kirowati et al., n.d.). Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat menjadikan perekonomian desa yang mandiri (Prasetyani et al., 2022), (Y. Pratami et al., 2023). BUMDes yang sudah berdiri kemudian mengalami kegagalan operasionalnya atau tidak berjalan sebagaimana mestinya penyebabnya antara lain kurangnya strategi yang digunakan dan lemahnya pembinaan dari aparatur desa. Lemahnya pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes (Candraningsih et al., 2019). Keberhasilan BUMDes ditentukan oleh strategi yang diambil oleh pengelola atau pengurus BUMDes, karena sebagai rintisan BUMDes sering mengalami kesalahan dalam memilih potensi untuk digarap dan hanya mencontoh atau meniru dari BUMDes yang lainnya yang sudah berhasil kemudian diterapkan di desanya tanpa perencanaan yang matang sebelumnya. Model pengembangan BUMDes seperti yang dinyatakan oleh (Arman et al., 2019) dalam bentuk lima pilar pengembangan ekonomi kreatif BUMDes yaitu dari segi persaingan, segi sumber daya, segi teknologi, segi institusi dan dari segi Lembaga keuangan.

BUMDes seperti juga badan usaha lainnya memerlukan pengaturan Sumber Daya Manusia (SDM). BUMDes sangat memerlukan pengelolaan SDM yang baik dan profesional yang dapat menggerakkan kegiatan usahanya. Hambatan dan masalah yang terjadi di BUMDes Karya Mandiri adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia sehingga pengelolaan BUMDes menjadi kurang optimal. Dengan adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia tersebut maka BUMDes Karya Mandiri harus merekrut Sumber Daya Manusia secara ketat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BUMDes. Dengan kondisi SDM terbatas, baik kuantitas maupun kualitas, harus dilaksanakan sistem penerimaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara profesional dan ketat. BUMDes dalam pengelolaannya memerlukan Direktur yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan operasionalisasi BUMDes dan tim Pelaksana BUMDes lainnya yang bertugas melaksanakan operasionalisasi BUMDes.

BUMDes Karya Mandiri Kecamatan Lembang di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu BUMDes dari 165 BUMDes di kawasan Kabupaten Bandung Barat bergerak dibidang usaha penyelenggaraan air bersih, penyewaan warung/kios, Gedung serba guna dan agribisnis. Sesuai dengan tujuan BUMDes yaitu menjadikan desa menjadi wilayah otonom berkaitan dengan usaha produktif sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di desa maka keberhasilan dari kinerja BUMDes dalam pengelolaannya merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa Cibodas mempunyai dua dana yaitu yaitu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan bersumber dari pendapatan bagi hasil dari laba usaha BUMDes dimana proporsi pembagian laba usaha BUMDes diputuskan pada waktu Musyawarah Desa dan tertera dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Desa Cibodas. Pengelola BUMDes Karya Mandiri terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara serta kepala unit usaha yang memiliki kemampuan

manajerial yang terbatas sehingga tidak dapat secara maksimal dalam mengelola BUMDes selain itu BUMDes Karya Mandiri memiliki potensi yang cukup besar namun belum pengelolaannya belum maksimal.

BUMDes Karya Mandiri memiliki usaha penyelenggaraan air bersih, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air bersih tersebut yang merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Pada masa pandemic Covid 19 dengan diputuskannya beberapa kebijakan seperti PPKM dan WFH atau bekerja dari rumah, menyebabkan kebutuhan air warga mengalami peningkatan yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap BUMDes Karya Mandiri. Meskipun omzet pendapatan air bersih menurun sebesar Rp. 20.000.000 yaitu dari Rp. 60.000.000 menjadi Rp. 40.000.000 per bulan, tetapi BUMDes Karya Mandiri dapat bertahan karena dasar dari pendirian BUMDes yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan profit bukan merupakan hal prioritas. Sumber daya modal atau permodalan juga penting untuk BUMDes untuk dapat menjalankan usahanya. Modal BUMDes bisa dalam bentuk uang atau aset dalam bentuk lainnya. Permodalan BUMDes Karya Mandiri yaitu bersumber dari bantuan pemerintah Provinsi, penyertaan modal masyarakat desa. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 dan Permendesa no 4 Tahun 2015 maka BUMDes dapat mendapatkan modal dari berbagai sumber. Dalam perkembangannya terdapat tambahan modal dari berbagai sumber, tetapi modal BUMDes Karya Mandiri masih terbatas karena modal utama BUMDes Karya Mandiri adalah dari Alokasi Dana Desa dari Desa Cibodas yang ketersediaanya tidak selalu ada setiap tahunnya karena ada saatnya Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk infrastruktur desa.

Keterbatasan dana tersebut menjadi salah satu kendala untuk perkembangan BUMDes Karya Mandiri. Selama ini BUMDes hanya mengenal sumber pendanaan yang dapat diakses adalah melalui perbankan padahal terdapat beberapa alternatif pendanaan dari berbagai Lembaga keuangan yang dapat diakses oleh BUMDes. Menurut (Zulbetti et al., 2019) lembaga keuangan dibutuhkan dalam perekonomian sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

Menurut Otoritas Lembaga Keuangan (OJK), berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menyatakan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68% yang meskipun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada di angka 38,03% namun indeks literasi keuangan tersebut belum maksimal. Literasi Keuangan menurut G20 dalam (OJK, n.d.) adalah keterampilan penting untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat rentan dan kurang terlayani terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta untuk mendukung kesejahteraan , inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Definisi lainnya yaitu menurut (Atkinson & Messy, 2011) literasi keuangan adalah kemampuan membaca, menganalisis, mengelola dan menceritakan tentang kondisi keuangan.

Rencana pendampingan yang akan dilakukan di BUMDes Karya Mandiri adalah berkaitan dengan aspek kelembagaan atau pengelolaan BUMDes dan aspek peningkatan literasi keuangan. Dua faktor tersebut yang menjadi sasaran utama adalah aspek pengelolaan dan manajemen pengelolaan terkait sumber daya pengelolanya serta peningkatan literasi keuangan berupa pemanfaatan teknologi informasi dalam pendanaan.

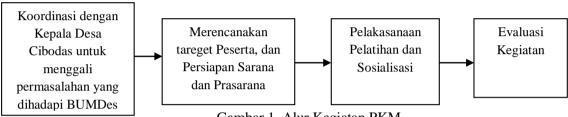
## 2. Metode

Untuk mewujudkan kemitraan sebagai bentuk dari hubungan usaha, oleh karena itu dilakukan dengan cara melalui kerangka yang selaras dengan tujuan usaha mitra, antara lain adalah pola. Dimana dalam pola tersebut, ada yang berperan selaku Pembina dan ada berperan selaku pelaksana. Tahapan pelaksanaan dan jalan keluar yang diajukan untuk menanggulangi permasalahan mitra yaitu:

- Permasalahan dalam lemahnya kemampuan manajerial Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola BUMDes
  - Peningkatan kemampuan manajerial SDM pengelola BUMDes oleh Dr. Yudi Wahyudin Suwandi, SE., M.Si yang mempunyai kompetensi di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia.
- 2. Permasalahan dalam masih rendahnya literasi keuangan mengenai sumber-sumber pendanaan. Keterbatasan permodalan di BUMDes maka perlu peningkatan pengetahuan layanan pendanaan bersama berbasis Teknologi Informasi sehingga akan diberikan sosialisasi mengenai berbagai alternatif pendanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi digital dengan tetap berprinsip pada prinsip kehati-hatian. Sosialisasi pemanfaatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi

informasi ini diberikan oleh Reni Marlina, SE., MM yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Keuangan

Dalam pengabdian ini digunakan metode pengabdian yang dimulai dari melakukan koordinasi, observasi dan survei pendahuluan yaitu dengan mendatangi Desa Cibodas dan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Cibodas dengan tujuannya untuk mengetahui dan memetakan permasalahan yang ada di BUMDes Karya Mandiri dilanjutkan dengan survei ke BUMDes Karya Mandiri dengan mewawancarai Bapak Agus selaku bagian keuangan BUMDes Karya Mandiri sehingga diperoleh informasi awal mengenai permasalahan yang ada di BUMDes Karya Mandiri, lalu dilakukan pelatihan mengenai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di BUMDes Karya Mandiri dan Sosialisasi mengenai pengenalan alternatif sumber pendanaan yang dapat diperoleh dari teknologi informasi digital yaitu Lembaga keuangan berbasis teknologi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu salah satunya adalah melalui pemanfaatan Financial Technology, Berikut ini adalah alur pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat:



Gambar 1. Alur Kegiatan PKM

#### 3. Hasil dan Pembahasan

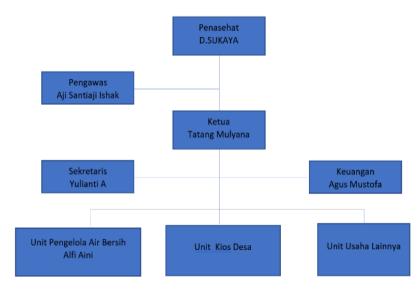
BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Desa mempunyai 4 (empat) jenis usaha bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, yaitu

- 1. BUMDes jenis serving
  - BUMDes tipe serving dalam melakukan usaha bisnisnya dengan memberikan pelayanan public dengan memanfaatkan sumber daya lokal pedesaan untuk masyarakat desa serta mendapatkan profit dari kegiatan pelayanan tersebut
- 2. BUMDes jenis banking
  - BUMDes jenis banking melakukan kegiatan usahanya serupa dengan bank desa. Modal BUMDes ini dari Anggaran Dasar Desa, Pendapatan Asli Desa, simpanan masyarakat dan dari pemerintah. BUMDes jenis banking ini bertipe bisnis sosial dan ekonomi yaitu segi sosialnya adalah dengan cara menjaga agar masyarakat desa terhidar dari rentenir dan melakukan kegiatan usaha ekonomi bisnis dengan cara memberikan jasa kredit proteksi sosial terhadap warga desa, terutama kelompok warga yang rentan dari jeratan para rentenir. Bisnis ekonomi artinya bank desa berfungsi seperti Lembaga Perkreditan Rakyat atau Lembaga Keuangan Mikro Desa dalam rangka menunjang permodalan usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat desa.
- 3. BUMDes jenis renting
  - BUMDes jenis renting melakukan usahanya dengan menyewakan barang, alat kerja, sarana transportasi dan kebutuhan lainnya yang diperlukan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- 4. BUMDes jenis brokering
  - BUMDes jenis brokering ini melakukan usahanya menjadi Lembaga perantara, contohnya adalah menjadi perantara dalam memasarkan produk pertanian masyarakat desa, atau dalam jasa pembayaran listrik atau pasar desa dan lainnya.

Berkaitan dengan empat jenis usaha yang dapat dikembangkan BUMDes tersebut, BUMDes Karya Mandiri Kecamatan Lembang di Kabupaten Bandung Barat adalah BUMDes yang bergerak dibidang usaha penyelenggaraan air bersih, penyewaan warung/kios, Gedung serba guna dan agribisnis. Selama ini pengelolaan BUMDes sudah terorganisasi dan memiliki struktur organisasi namun belum optimal, terlihat dari pada saat sebelum dilakukan pelatihan dilakukan questioner kepada pengelola BUMDes mengenai beberapa pertanyaan terkait dengan pengetahuan yang dimiliki berhubungan dengan praktik pengelolaan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, terlihat dari hasil jawaban *questioner* yaitu pengelola masih belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam mengelola BUMDes nya hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan mengenai prinsip-prinsip manajemen.

Berdasarkan hasil *questioner* terlihat bahwa masih rendahnya kemampuan untuk mengembangkan usaha BUMDes yang dalam hal ini harus secara aktif mencari sumber-sumber usaha baru untuk meningkatkan pendapatan BUMDes yang diawali dengan perlu mengetahui potensi yang ada di desa Cibodas yang dapat dikembangkan oleh pengelola BUMDes dan juga masih rendahnya informasi mengenai sumber-sumber pendanaan yang dapat menjadi alternatif untuk penambahan modal dari BUMDes supaya dapat lebih berkembang. Pengelola BUMDes Karya Mandiri terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara serta kepala unit usaha yang memiliki kemampuan manajerial yang terbatas sehingga tidak dapat secara maksimal dalam mengelola BUMDes.

BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki Struktur Organisasi yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri

Untuk setiap bagian dalam Struktur BUMDes tersebut sudah memiliki *Job Description* nya namun dalam pelaksanaannya masih terjadi perangkapan tugas , misalnya bagian keuangan dalam hal ini yang dijabat oleh Pak Agus masih merangkap dengan mengawasi operasional setiap unit dan administrasi. Pendapatan BUMDes Karya Mandiri adalah dari pengelolaan air bersih yang sampai saat ini sudah mempunyai 2300 konsumen, selanjutnya adalah sewa kios yang berjumlah 10 kios serta unit usaha lainnya yang baru berjalan lagi di tahun 2022 yaitu penyewaan GOR. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia di desa untuk mengatur dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik inilah yang dijadikan latar belakang diberikannya pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Peserta yang hadir pada saat pelatihan terdiri dari Pengelola dan staf BUMDes Karya Mandiri.

Materi pelatihan untuk pengelola BUMDes mulai dari materi mengenai penerapan konsep Manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengendalian dalam mengelola BUMDes sehingga diharapkan pengelola BUMDes dalam mengelola BUMDes nya selalu menerapkan prinsip-prinsip manajemen tersebut sehingga BUMDes dalam pengelolaannya menerapkan perencanaan , contohnya dalam bentuk penentuan tujuan dan strategi bisnis, dalam hal ini BUMDes menetapkan tujuan yang akan dicapai baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta strategi untuk mencapai tujuan sehingga akan membantu BUMDes dalam mengalokasikan sumber dayanya dengan efektif dan efisien. Penerapan Pengorganisasian dalam pengelolaan BUMDes yaitu BUMDes mengorganisasi seluruh sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya agar dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan BUMDes

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Penerapan Pengarahan dalam pengelolaan BUMDes yaitu pimpinan BUMDes memberikan arahan dan motivasi SDM BUMDes supaya dapat bekerja sesuai dengan uraian pekerjaanya, memberikan umpan balik dan memberikan penghargaan yang sesuai. Penerapan pengendalian dalam pengelolaan BUMDes yaitu pengelola BUMDes mengendalikan proses bisnis, pemantauan kinerja, pengendalian keuangan dan pengendalian risiko serta dapat dengan cepat mengidentifikasi jika terjadi masalah. Untuk Staf BUMDes Karya Mandiri diberikan pelatihan mengenai pengelolaan manajemen waktu agar staf dapat mengelola waktunya secara efisien dan efektif dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Materi selanjutnya adalah mengenai prinsip pengelolaan BUMDes, dimana menurut (Srimuliana et al., 2022) pengelolaan BUMDes harus akuntabel, jujur, demokratis, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat. Dilanjutkan materi mengenai Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan usaha dan cara membangun *mindset* pengelola bisnis serta *mapping* potensi desa dan pemilihan jenis usaha. Pemetaan potensi desa merupakan hal yang penting dan menjadikan BUMDes menjadi memiliki cetak biru dalam menjalankan unit usahanya dan dari hasil pemetaan potensi yang tepat dapat menjadikan BUMDes memiliki tujuan yang jelas (Widiastuti et al., 2019). Setelah pelatihan setiap menjadikan pengelola BUMDes lebih memahami bagaimana mengelola BUMDes secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, serta lebih termotivasi untuk melakukan inovasi dan kreatif dalam membuka unit bisnis baru serta mulai menggunakan teknologi informasi untuk memasarkan produknya yang dapat meningkatkan pendapatan untuk BUMDes. Pelatihan mampu memberikan manfaat bagi pengelola BUMDes terutama dalam peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), kemampuan (*ability*), serta sikap /tingkah laku (*attitude*) sehingga dapat meningkatkan performansi dalam menjalankan operasionalisasi BUMDes.

BUMDes sebagai badan usaha dalam menjalankan kegiatannya memerlukan modal. BUMDes Karya Mandiri memiliki modal awal yang bersumber dari bantuan Pemerintah provinsi, penyertaan modal masyarakat desa dan modal yang berasal dari luar desa sesuai dengan PP no 43 tahun 2015 dan Permendesa No. 4 tahun 2015. Seiring dengan berkembangnya BUMDes Karya Mandiri terdapat beberapa tambahan modal yaitu berupa dana CSR dari Rotary Club dan bank BJB. Pengelola BUMDes dalam hal ini diberikan pelatihan dengan materi mengenai peningkatan literasi keuangan mengenai sumber pendanaan berbasis teknologi informasi. Peningkatan literasi keuangan ini diberikan karena pengetahuan keuangan yang luas dan mendalam dapat menjadikan keterampilan pengelolaan keuangan usaha cenderung lebih baik (Zikrillah et al., 2021), (Mayasari Arifin et al., 2022), (Di et al., 2015).

BUMDes Karya Mandiri sudah berbadan hukum sehingga bisa mendapatkan pinjaman dari bank dan Lembaga keuangan lainnya yang berbasis digital seperti Financial Technologi sehingga dapat memperluas akses keuangan BUMDes serta mendorong digitalisasi keuangan. Alternatif pendanaan yang bisa didapatkan BUMDes yaitu dari Lembaga keuangan berbasis teknologi informasi seperti Financial Technology (Fintech). Salah satu jenis fintech yang yang dapat dijadikan alternatif pendanaan adalah fintech peer to peer lending, menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech lending/peer to peer adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Fintech lending disebut juga sebagai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Materi selanjutnya adalah pemberian informasi mengenai daftar fintech yang legal dan mempunyai izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga diharapkan pengelola BUMDes terhindar dari fintech yang ilegal dan tidak berizin OJK. Setelah adanya sosialisasi mengenai fintech menjadikan adanya peningkatan literasi keuangan pengelola BUMDes bahwa terdapat alternatif pendanaan yang ada dalam *fintech* yang resmi terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang dapat digunakan oleh BUMDes yang dapat menjadikan BUMDes menjadi lebih berkembang.

Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian di BUMDes Karya Mandiri yang dilakukan di Kantor Desa Cibodas :



Gambar 3. Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BUMDes



Gambar 4. Pemberian Materi Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM BUMDes



Gambar 5. Foto Bersama Setelah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BUMDes

# 4. Simpulan

Dengan adanya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di BUMDes Kabupaten Bandung Barat berupa pelatihan terkait peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes dan peningkatan literasi keuangan mengenai sumber alternatif pendanaan eksternal dapat meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes dalam menerapkan prinsip manajemen dalam pengelolaan BUMDes serta peningkatan literasi keuangan pengelola BUMDes sehingga dapat meningkatkan performansi dalam menjalankan operasionalisasi BUMDes.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola BUMDes Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat mengucapkan terima kasih kepada LP3M STIE EKUITAS yang telah memfasilitasi dalam bentuk hibah internal pengabdian STIE EKUITAS dan pengelola BUMDes Desa Cibodas Kabupaten Bandung Barat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

#### 6. Referensi

- Anggraeni, A. S. R. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155–167.
- Ansari, B., Mirdamadi, S. M., Zand, A., & Arfaee, M. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, 5(1), 26–31. https://doi.org/10.19026/rjees.5.5635
- Arman, A., Marsuki, M., & Sulkipli, S. (2019). Bumdes Development Model Through College and Banking Partnerships [Model Pengembangan Bumdes Melalui Kemitraan Perguruan Tinggi dan Perbankan]. *Proceeding of Community Development*, 2, 520. https://doi.org/10.30874/comdev.2018.148
- Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2011). Assessing Financial Literacy in 12 Countries. *Journal of Pension Economics and Finance*, 10(04), 657–665.
- Candraningsih, K. E., Sarayanti, K. Y., Pratiwi, P. R., Suryantini, L. P., Juliantari, I. G. A. D., & Devilaksmi, A. T. (2019). Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Pada Bumdes Bulian Kecamatan Kubutambahan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 24–32. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19858
- Di, K., Umkm, K., & Tegal, K. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan Di Kalangan Umkm Kota Tegal. *Management Analysis Journal*, 4(3), 252–257. https://doi.org/10.15294/maj.v4i3.8876
- Kirowati, D., Dwi Setia, L., & Negeri Madiun, P. (n.d.). Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa ( Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). In *Sistem Informasi*.
- Lumintang, J., Waani, J. F., & Rahman Utami, E. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Science*, 2(1), 15–21. https://doi.org/10.18196/bdr.7151
- Mayasari Arifin, Azib, & Setyawan, S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Sektor Makanan di Kota Bandung). *Bandung Conference Series: Business and Management*, 2(2), 1409–1412. https://doi.org/10.29313/bcsbm.v2i2.4631
- OJK. (n.d.). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025.pdf.crdownload.
- Prasetyani, D., Riyanto, G., Sari, V. K., & Juwita, A. H. (2022). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui bumdes di desa gagaksipat kecamatan ngemplak kabupaten boyolali. 1(2), 30–35.
- Rahmatika N.D, Subroto.S, Indriasih D, P. D. (2019a). Pengembangan Kualitas BUMDES Pendekatan Model Tetrapreuneur serta kemitraan dengan Perguru. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 2(2), 84–95.
- Rika Fatimah, P. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551
- Srimuliana, R., Furqani, H., & Jalilah. (2022). Peran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 40–54. https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1578

- Widiastuti, H., Kresnawati, E., & Rahman Utami, E. (2019). Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 7(1). https://doi.org/10.18196/bdr.7151
- Y. Pratami, M.Fahdi, M.I.Rosyadi, F. V. (2023). Potensi Pengembangan Desa Pada BUMDes Bumi Mulya Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan. 4(4), 146–151.
- Yuesti, A. S. K. (2017). Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif Pendukung Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pajahan dan Munduk Temu Kecamatan Pupuan Tabanan. https://www.researchgate.net/publication/321718673
- Zikrillah, Wahyudi, & Kusmana, A. (2021). Determinan Perilaku Manajemen Keuangan Umkm Di Kelurahan Lenteng Agung DKI Jakarta. *Korelasi: Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 1428–1445.
- Zulbetti, R., Perwito, P., & Puspita, V. A. (2019). Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Pengurus BUMDES Melalui Pelatihan Keuangan di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(2), 200–211. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i2.3824